

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 223 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangalengan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pangalengan untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pangalengan serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pangalengan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pangalengan untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029 yang akan digunakan Kecamatan Pangalengan untuk melaksanakan rencana kerja Kecamatan Pangalengan.
(2) Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pangalengan tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja Kecamatan Pangalengan dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Pangalengan;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Pangalengan yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Pangalengan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA.

(2) Renja Kecamatan Pangalengan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029.

## BAB II
## DOKUMEN RENJA KECAMATAN PANGALENGAN

### Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja Kecamatan Pangalengan tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja Kecamatan Pangalengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA KECAMATAN PANGALENGAN

### Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja Kecamatan Pangalengan meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Pangalengan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Pangalengan dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja Kecamatan Pangalengan.

Pasal 7

(1) Kecamatan Pangalengan membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja Kecamatan Pangalengan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja Kecamatan Pangalengan tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Camat Kecamatan Pangalengan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan dan evaluasi hasil Renja Kecamatan Pangalengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Pangalengan terhadap pelaksanaan dan hasil Renja Kecamatan Pangalengan.

(3) Camat Kecamatan Pangalengan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja Kecamatan Pangalengan.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan dilakukan pada saat penyusunan RKA.

## BAB V
## PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PANGALENGAN

### Pasal 9

(1) Renja Kecamatan Pangalengan dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Pangalengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja Kecamatan Pangalengan tahun 2026.

## BAB VI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 223

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
PANGALENGAN TAHUN 2026

# RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1)

menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Pangalengan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 telah memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026.

Kecamatan Pangalengan sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten Bandung " Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera" dengan Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melaluiBirokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan,

Sebagai bagian dari Perencanaan, Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian

Kewenangan diikuti Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769 -TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 16 Bidang Pelimpahan, 28 sub bidang Pelimpahan, dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan)

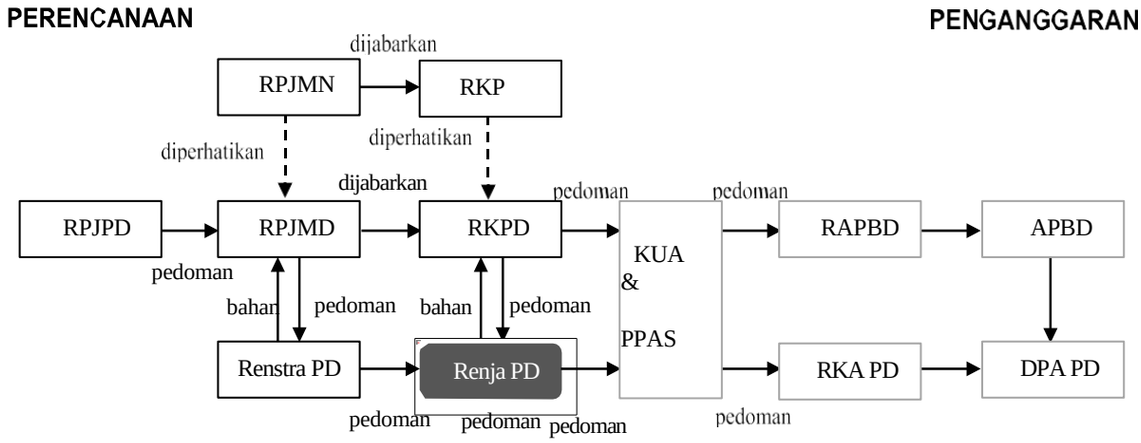
Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai mengikuti Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan

antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).




Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 serta Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
d. Undang-Undang dan/atau Peraturan yang berkaitan dengan SKPD yang bersangkutan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
o. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 47).

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung di tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2026.

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Pangalengan, proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pangalengan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangalengan

2.4. Review Terhadap Renja Kerja RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Kecamatan Pangalengan Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangalengan Tahun Lalu

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Pangalengan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Sasaran Strategis. Data capaian kinerja tahun 2024 terjadi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian
Kinerja Utama
Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung
Tahun 2024

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2024 | Realisasi 2024 | Capaian 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai | 75.30 | 77.30 | 102,66 |
| | | 2. Persentase BMD dalam Kondisi baik | % | 96.00 | 97,73 | 101,35 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai IKM | Nilai | 84.00 | 84,89 | 101,06 |
| 3. | Meningkatn ya kualitas Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Cepat Berkembang | Desa | 2 | 2 | 100 |
| Rata-rata capaian | | | | | | 105,07 |

(Sumber LKIP tahun 2024)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Pangalengan pada tahun 2024 mencapai 105,07 %, sedangkan untuk capaian realisasi program dan Kegiatan Kecamatan Pangalengan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024

| No | Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi | % | *Menunjang/ Tidak Menunjang* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UNSUR | 6,256,002,188 | 5,847,850,3 | | Menunja |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KEWILAYAHAN | | 62 | | ng |
| | KECAMATAN | 6,256,002,188 | 5,847,850,362 | | Menunjang |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5,350,662,202 | 4,655,840,522 | 62.62 | Menunjang |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 54,627,000 | 46,675,000 | 60.63 | Menunjang |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,650,000 | 5,610,000 | 66.26 | Menunjang |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5,500,000 | 5,440,000 | 68.61 | Menunjang |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5,500,000 | 5,440,000 | 68.61 | Menunjang |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 37,677,000 | 33,185,000 | 87.38 | Menunjang |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,478,486,002 | 4,121,756,725 | 62.03 | Menunjang |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,478,486,002 | 4,121,756,725 | 62.03 | Menunjang |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 6,500,000 | 6,460,000 | 66.38 | Menunjang |
| 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6,500,000 | 6,460,000 | 66.38 | Menunjang |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian | 46,366,000 | 46,267,000 | 66.76 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Perangkat Daerah | | | | |
| 1.4.1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 46,366,000 | 46,267,000 | 66.76 | Menunjang |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 138,763,604 | 137,838,222 | 66.31 | Menunjang |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4,000,000 | 3,668,800 | 66.67 | Menunjang |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 76,068,804 | 76,068,500 | 100 | Menunjang |
| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5,000,000 | 4,664,400 | 66.86 | Menunjang |
| 1.5.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12,816,522 | 12,816,522 | 100 | Menunjang |
| 1.5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,000,000 | 5,160,000 | 86.5 | Menunjang |
| 1.5.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31,878,578 | 31,740,000 | 66.57 | Menunjang |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 430,340,148 | 411,604,870 | 65.72 | Menunjang |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57,060,148 | 42,407,430 | 74.32 | Menunjang |
| 1.6.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 373,280,000 | 366,467,440 | 68.66 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.3 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 162,846,148 | 178,638,705 | 62.76 | Menunjang |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47,000,000 | 34,056,085 | 72.46 | Menunjang |
| 1.7.1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15,346,148 | 15,268,250 | 66.66 | Menunjang |
| 1.7.2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 130,500,000 | 126,584,370 | 66.3 | Menunjang |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 363,000,000 | 355,731,870 | 68 | Menunjang |
| 2.1 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 | Menunjang |
| 2.1.1 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 13,000,000 | 13,000,000 | 100 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 350,000,000 | 342,731,870 | 67.62 | Menunjang |
| 2.2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 350,000,000 | 342,731,870 | 67.62 | Menunjang |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 256,500,000 | 254,115,000 | 66.07 | Menunjang |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 158,000,000 | 157,675,000 | 66.68 | Menunjang |
| 3.1.1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 158,000,000 | 157,675,000 | 66.68 | Menunjang |
| 3.1.2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 68,500,000 | 66,140,000 | 67.6 | Menunjang |
| 3.1.3 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 63,500,000 | 63,462,000 | 66.64 | Menunjang |
| 3.1.4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 25,000,000 | 22,678,000 | 60.71 | Menunjang |
| 3.1.5 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 | Menunjang |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 57,115,000 | 57,006,000 | 66.81 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 51,605,000 | 51,566,000 | 66.63 | Menunjang |
| 4.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 6,655,000 | 6,650,000 | 66.62 | Menunjang |
| 4.1.2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 44,650,000 | 44,616,000 | 66.63 | Menunjang |
| 4.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 5,510,000 | 5,440,000 | 68.73 | Menunjang |
| 4.2.1 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5,510,000 | 5,440,000 | 68.73 | Menunjang |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 106,674,686 | 106,647,000 | 66.67 | Menunjang |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 106,674,686 | 106,647,000 | 66.67 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 30,737,000 | 30,722,000 | 66.65 | Menunjang |
| 5.1.2 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 51,737,686 | 51,725,000 | 66.67 | Menunjang |
| 5.2.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 24,500,000 | 24,500,000 | 100 | Menunjang |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 121,450,000 | 118,207,000 | 67.33 | Menunjang |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 121,450,000 | 118,207,000 | 67.33 | Menunjang |
| 6.1.1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 83,630,000 | 83,615,000 | 66.68 | Menunjang |
| 6.1.2 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 37,520,000 | 34,262,000 | 61.4 | Menunjang |

Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun

   dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat sub kegiatan yang tidak aada penyerapan namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

   Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pangalengan sehingga realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Capaian Kinerja di Kecamatan Pangalengan yang secara keseluruhan mencapai 90% tentu ada implikasi terhadap Renstra PD, sehingga menunjang

terhadap capaian Indikator Kinerja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

   Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

   a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
   b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
   c. Perubahan Kebijakan/Aturan

   Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 khususnya Kecamatan Pangalengan berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

   Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan

Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Pangalengan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realiasi s/d Triwulan ITahun 2025 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7/6) | (9) | (10) | (11)=(5+7+10) | (12)=(11/4) |
| | KECAMATAN PANGALENGAN | | | | | | | | | | |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | *Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik* | 67 | point | 68.50 | Point | 75,30 | Point | 77,30 | Point | 103% | 78,10 | Point | 0,00 | Point | | | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 20 | % | | - | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat* | 20 | laporan | 6 | dokumen | 4 | dokumen | 4 | dokumen | 100% | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 11 | dokumen | 55% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 10 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100% | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 5 | dokumen | 50% |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | *Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 10 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 2 | dokumen | 100% | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 5 | dokumen | 50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 50 | dokumen | 10 | laporan | 5 | laporan | 5 | laporan | 100% | 5 | laporan | 1 | laporan | 16 | laporan | 32% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 25 | % | | - | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 105 | org | 21 | org/bulan | 21 | org/bulan | 21 | org/bulan | 100% | 20 | org/bulan | 20 | org/bulan | 62 | org/bulan | 59% |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 2 | laporan | 200% |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 10 | % | | - | |
| 7.01.01.2.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut | *Jumlah paket pakaian dinas beserta* | 22 | ~~Paket~~ | 0 | ~~Paket~~ | 0 | ~~Paket~~ | 0 | ~~Paket~~ | 0% | 22 | ~~Paket~~ | 0 | ~~Paket~~ | 0 | ~~Paket~~ | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kelengkapannya | *atribut kelengkapanya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 200 | org | 50 | org | 50 | org | 50 | org | 100% | 50 | org | 10 | org | 110 | org | 55% |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 29,72 | % | | - | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | *Jumlah Paket Komponen Instalasi* | 5 | paket | 1 | paket | 1 | paket | 1 | paket | 100% | 3 | paket | 0 | paket | 2 | paket | 40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | *Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 20 | paket | 1 | paket | 4 | paket | 4 | paket | 100% | 12 | paket | 1 | paket | 6 | paket | 30% |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 10 | paket | 1 | paket | 2 | paket | 2 | paket | 100% | 12 | paket | 3 | paket | 6 | paket | 60% |
| 7.01.01.2. | Penyediaan Barang | *Jumlah Paket Barang* | 10 | paket | 1 | paket | 2 | paket | 2 | paket | 100% | 5 | paket | 1 | paket | 4 | paket | 40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.0005 | Cetakan dan Penggandaan | *Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 5 | dok | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 3 | paket | 60% |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 890 | laporan | 2 | laporan | 178 | Laporan | 178 | Laporan | 100% | 12 | Laporan | 3 | Laporan | 183 | Laporan | 21% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 25 | % | | - | |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat | 4 | laporan | 0 | laporan | 0 | laporan | 0 | laporan | 0% | 4 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 25% |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 15 | laporan | 3 | laporan | 3 | laporan | 3 | laporan | 100% | 12 | laporan | 3 | laporan | 9 | laporan | 60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 40 | laporan | 1 | laporan | 8 | laporan | 8 | laporan | 100% | 12 | laporan | 3 | laporan | 12 | laporan | 30% |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 12,22 | % | | - | |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan* | 25 | unit | 5 | unit | 5 | unit | 5 | unit | 100% | 5 | unit | 1 | unit | 11 | unit | 44% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dinas Jabatan | *dibayarkan Pajaknya* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 30 | unit | 6 | unit | 6 | unit | 6 | unit | 100% | 6 | unit | 1 | unit | 13 | unit | 43% |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 10 | Gedung | 2 | Gedung | 2 | Gedung | 2 | Gedung | 100% | 2 | Gedung | 0 | Gedung | 4 | Gedung | 40% |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTA | *INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT* | 83.00 | point | 83.54 | point | 84,00 | point | 84,89 | point | 101% | 85,00 | point | 0,00 | point | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | *Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | 200 | % | 200% |
| 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | *Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana* | 4 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 1 | dokumen | 0 | dokumen | 2 | dokumen | 50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Pelayanan Umum* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 25 | % | | - | |
| 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | 60 | laporan | 6 | Laporan | 12 | laporan | 12 | laporan | 100% | 4 | laporan | 1 | laporan | 19 | laporan | 32% |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN | *Persentase pemberd* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 20 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | *ayaan masyarakat desa* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 20 | % | | - | |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 4 | laporan | 0 | | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 5 | laporan | 1 | laporan | 2 | laporan | 50% |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyara | *Prsentase lembaga kemasyarakatan yang* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | katan Tingkat Kecamatan | *dibina* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 5 | lembaga | 1 | lembaga | 1 | lembaga | 1 | lembaga | 100% | 1 | lembaga | 0 | lembaga | 2 | lembaga | 40% |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 5 | laporan | 0 | | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 1 | laporan | 20% |
| 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi | *Jumlah Laporan Fasilitasi* | 5 | laporan | 0 | | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 1 | laporan | 20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tepat Guna | *Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan | *Persentase keluaga yang terfasilitasi* | 100 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0% | 100 | % | 0 | % | | - | |
| 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0% |
| 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0% |
| 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | 50 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0 | Keluarga | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | | - | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | *Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | | - | |
| 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara* | 5 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 2 | laporan | 40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | *Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 5 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 2 | laporan | 40% |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 0 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | *Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 5 | laporan | 0 | | 1 | laporan | 1 | laporan | 100% | 1 | laporan | 0 | laporan | 1 | laporan | 20% |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | *Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 100 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 15 | % | | - | |
| 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 250 | org | 200 | org | 50 | org | 50 | org | 100% | 50 | org | 0 | org | 250 | org | 100% |
| 7.01.05.2. | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku* | 800 | org | 250 | orang | 200 | org | 200 | org | 100% | 50 | org | 10 | org | 46 | org | 58% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.0004 | Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | *dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 5 | dokmen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 4 | dokumen | 1 | dokumen | 3 | dokumen | 60% |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | *Persentase desa yang dibina dan diawasi* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 20 | % | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100% | 100 | % | 50 | % | | | |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | 52 | dokumen | 13 | dokumen | 13 | dokumen | 13 | dokumen | 100% | 1 | dokumen | 0 | dokumen | 26 | dokumen | 50% |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangun* | 5 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 3 | dokumen | 60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dengan Pembangunan Desa | *an Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | | | | | | | | | | | | | |

TC-29 merupakan tabel rekapitulasi hasil capaian perencanaan kerja dan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target pada akhir periode renstra. Setelah dilakukan analisis pada penyusunan renstra perubahan, terdapat perubahan target capaian pada indikator sasaran strategis "Persentase Desa Beradministrasi Baik". Hal ini dikarenakan indikator tersebut sudah tidak relevan untuk dijadikan indikator sasaran strategis.

Relevansi penetapan indikator sasaran strategis kaitan penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai dari tugas dan fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dirumuskan pada perubahan rencana strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, pada pelaksanaan urusan peningkatan kualitas pemerintahan desa terdapat masalah pokok yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan yaitu belum optimalnya pengukuran keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi desa dari berbagai aspek. Untuk itu dibutuhkan indikator pengukur kinerja yang komerhensif terhadap ketiga tujuan pembentukan kecamatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Maka ditetapkanlah Indikator "Jumlah Desa Cepat Berkembang" sebagai pengganti indikator "Persentase Desa Beradministrasi Baik"

Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dipilih sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator tersebut merupakan alat ukur dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pada tiga bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dapat

dijadikan ukuran yang objektif dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Pangalengan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pangalengan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun Kecamatan. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Perencana di tingkat SKPD mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan berdasarkan indikator yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |
| | | | | 2023 (n-2) | 2024 (n-1) | 2025 (n) | 2026 (n+1) | 2023 (n-2) | 2024 (n-1) | 2025 (n) | 2026 (n+1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai AKIP | | | 68,50 Point | 75,30 Point | 78.10 | 79,00 | 75,30 Point | 77,30 Point | 78.10 | 79,00 | Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pangalengan Pencapaian nilai AKIP Kecamatan Pangalengan masih terdapat kekurangan untuk diperbaiki, seperti pada capaian pengukuran kinerja yang masih belum optimal. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik | | | 64,10% | 96% | 97,80% | 98,00% | 93,26% | 97,30 % | 97,80% | 98,00% | Terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemukan pada pengelolaan BMD di Kecamatan Pangalengan yaitu 1. Penertiban aset agar prosedur penghapusan barang dalam kondisi rusak dapat ditempuh.2. Pendataan BMD secara keseluruhan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset Selain permasalahan-permaslahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indek Kepuasan Masyarakat | | | 83, 10 Point | 84, 00 Point | 85, 00 Point | 85, 50 Point | 83, 54 point | 84,89 Point | 85, 00 Point | 85, 50 Point | IKU Kecamatan Pangalengan Pada tahun 2024, Kecamatan Pangalengan memperoleh nilai IKM sebesar 84,89 poin,atau tercapai sebesar 100,01%. Meskipun capaian melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan seperti unsur sarana dan pra sarana, waktu pelayanan, serta tidak adanya kotak kritik dan saran untuk mewadahi keluhan masyarakat |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jumlah Desa Cepat Berkembang | | | | | 2 Desa | 2 Desa | - | - | 2 Desa | 2 Desa | IKU Kecamatan Pangalengan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap capaian persentase desa beradministrasi baik, sebagai upaya penyelarasan pengukuran kinerja, Kecamatan Pangalengan melakukan perubahan indikator "persentase desa beradministrasi baik" menjadi "jumlah desa cepat berkembang" pada perubahan rencana strategis tahun 2021-2026. Perubahan tersebut didasari dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026. |

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pangalengan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Pangalengan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Identifikasi masalah atau disebut juga dengan *Problem Identification* adalah suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah dengan kata lain identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang bisa dikatakan langkah paling penting diantara langkah-langkah proses yang lain. Analisis isu-isu strategis

merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Adapun indikator permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Akuntabilitas Kinerja | Masih Kurangnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing | Moratorium penerimaan CPNS/ belum meratanya penempatan PNS, terbatasnya diklat/bimtek peningkatan kapasitas pegawai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Aset barang pemerintah | Penataan ruang pelayanan dan penataan ruangan gedung kantor, pagar kantor | Keterbatasan anggaran Kecamatan |
| 3. | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Sarana prasarana pelayanan | Kebijakan Pemerintah, koordinasi internal dan tingkat sektoral |

Pada tabel tersebut diatas, dapat kita lihat permasalahan- permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya jumlah tenaga jabatan pelaksana yang terlatih untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat kurang memadai, salah satunya pelayanan langsung adminduk yaitu penataan ruang tunggu antrian pelayanan kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan Pangalengan harus sudah di laksanakan pembangunan rehab.
3. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, terutama Sumber Daya Manusia.
4. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, khususnya terkait "*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang*

*Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera*" dengan tugas dan fungsi Kecamatan terdapat pada Misi ke 4 (Empat) yaitu "Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan"

Tabel B- 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangalengan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera*" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Peningkatkan kualitas Sumber Daya | | | |
| | Meningkatnya ketersediaan layanan Masyarakat, Masyaraka berkualitas dan partisipasi Masyarakat dalam bidang masyarakat dan Kesehatan | Kurangnya tenaga pelaksana yang Profesional untuk mempermudah dan memparlancar pelayanan kepada Masyarakat. | Masih kurangnya pendukung pengolah data/ informasi hasil penelitian | Adanya jaringan internet dan sarana prasaran penunjang operasional (PC Masyarakat/ laptop) |
| | | | | |
| 2 | Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing | | | |
| | Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai optimalisasi | Belum adanya petugas secara khusus menangani bidangi dan memfasilatasi bidang perekonomian | Masih rendahnya motivasi terhadap peningkatan ekonomi mikro | Banyak sektor andalan yang bisa dijadikan faktor pendorong perekonomian |
| 3 | Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah | | | |

| Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif,*<br>*Dinamis, Agamis, dan Sejahtera*" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | Meningkatkan ketersediaan dan kualaitas infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah | Pemukiman padat penduduk mengancam ruang terbuka hijau menyempit. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan | Sebagain besar wilayah kecamatan Pangalengan merupakan daerah rawan bencana | Kepedulian masyarakat dalam mendukung program pemerintah |
| 4 | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | | | |
| | Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperharikan daya dukung lingkungan daya 36asyara lingkungan | Pendekatan/ sosialisasi belum terlaksana dengan baik | Cepatnya pembangunan fisik dan rendahnya kepedulian sebagaian masyarakat terhadap lingkungan | Peraturan Daerah |
| 5 | Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Meningkatkan kinerja Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan masyarakat | Kurangnya SDM Kecamatan | Belum merata penempatan PNS dan kurangnya pemberdayaan pegawai | Pengadaan tambahan pegawai/karyawan, Peningkatan tunjangan pegawai dan penerapan system |

| Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera*" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | | | Capaian kinerja pegawai |

Tabel B- 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik | Kurangnya petugas pelayanan yang Masyarakat | Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang | Sebagain sarana prasaran pendukung |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | untuk | pelayanan | telah tersedia |
| | | menunjang pelayanan publik | masyarakat serta terbatasnya rekruitmen pegawai/ petugas/ operator | baik masyarakat maupun jaringan internet |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap | Kurangnya sosialisasi penyelenggaraan program pemerintah | Fasilitasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap |

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | penyelenggaraa n program pemerintah | kepada masyarakat | program dan perencanaan pembangunan |
| 3 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Pangalengan | Masih rendahnya disiplin pegawai | a. Terbatasnya sumber daya aparatur<br>b. Belum optimalnya inventarisasi barang/asset | Optimalisasi sumber daya yang ada serta tersusunnya pelaporan internal |

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka maka ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang diuraikan pada BAB IV Dokumen Renja 2024

2.4 Review terhadap Renja RKPD

1. Perbandingan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Membandingkan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Renja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

   Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
   Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Renja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan
   Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.
   Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

Renja RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

| Rancangan Awal renja RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif ( Rp. ) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif ( Rp. ) | |
| KECAMATAN PANGALENGAN | | | | 5.092.665.408 | | | | - | 6.211.714.984,00 | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 5.092.665.408 | | | | | 6.211.714.984,00 | |
| KECAMATAN | | | | 5.092.665.408 | | | | | 6.211.714.984,00 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Pangalenga | Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan ( AKIP ) | 76 | 4.437.665.408 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Pangalenga | *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*<br>*Indeks Manajemen Risiko* | 61,00 Poin<br>40,30 Poin | 5.130.518.800,00 | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 100% | 15.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Nilai AKIP<br>Persentase aset BMD dalam kondisi baik | 78.50<br>97.90 | 48.600.000,00 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 9.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 5 Laporan | 35.000.000,00 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100% | 3.980.829.408 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Pangalenga | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22/12 bulan | 3.980.829.408 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kec. Pangalenga | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | 1 Data | 1.700.000,00 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan | 100% | 1.500.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu* | 100 % | 4.401.360.000,00 | |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 laporan | 1.500.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Pangalenga | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 20 Orang/bulan | 4.397.960.000,00 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | 100% | 9.369.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 4 Laporan | 3.400.000,00 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kec. Pangalenga | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 Paket | 369.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD* | 100 % | 1.700.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Pangalenga | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 9.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 Laporan | 1.700.000,00 | |
| Administrasi UmumPerangkat Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100% | 55.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu* | 100 % | 15.000.000,00 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangalenga | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 4.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kec. Pangalenga | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 21 Paket | 0,00 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangalenga | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 10.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 50 Orang | 15.000.000,00 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangalenga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 paket | 5.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 % | 125.518.800,00 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Pangalenga | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | 5.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangalenga | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | 4.000.000,00 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 6.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangalenga | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | 70.518.800,00 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 25.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangalenga | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 12 Paket | 5.000.000,00 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 338.100.148 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 5 Paket | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 60.148 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 48.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 35.000.000,00 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 290.040.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 % | 428.340.000,00 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik | 94.00 | 37.866.852 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | 3.000.000,00 | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Pangalenga | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 14.819.852 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | 48.000.000,00 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Pangalenga | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 unit | 10.547.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | 377.340.000,00 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Pangalenga | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Gedung | 12.500.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase BMD dalam Kondisi Baik* | 98,00 % | 110.000.000,00 | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Pangalenga | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Gedung | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 13 Unit | 55.000.000,00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Pangalenga | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 84.20% | 205.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Pangalenga | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 6 Unit | 15.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Pangalenga | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 5.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Pangalenga | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | 2 Unit | 40.000.000,00 | |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 dokumen | 5.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Pangalenga | *Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat* | 100 % | 490.866.184,00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Pangalenga | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100% | 200.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec. Pangalenga | *Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum* | 100 % | 15.000.000,00 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 3 laporan | 200.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Pangalenga | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina | 100% | 175.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Pangalenga | *Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan* | 100 % | 475.866.184,00 | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangalenga | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 100% | 75.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | 12 Laporan | 475.866.184,00 | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 75.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Pangalenga | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina* | 100 % | 325.330.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) | Kec. Pangalenga | persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100% | 95.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangalenga | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | 100 % | 122.380.000,00 | |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Pangalenga | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 lembaga kemsyarakatan | 50.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 4 Laporan | 122.380.000,00 | |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 20.000.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kec. Pangalenga | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi* | 100 % | 95.000.000,00 | |
| Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 laporan | 25.000.000 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 1 Lembaga K emasyarakat an | 50.000.000,00 | |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangalenga | Persentase Keluarga yang terfasilitasi | 100% | 5.000.000 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| Peniingkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kec. Pangalenga | Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 1.000.000 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | 1 Laporan | 25.000.000,00 | |
| Peningkatan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkaulitas dan berdaya saing | Kec. Pangalenga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 50 Keluarga | 1.000.000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangalenga | *Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan* | 100 % | 107.950.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kec. Pangalenga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 50 Keluarga | 1.000.000 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kec. Pangalenga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kec. Pangalenga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 1.000.000 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kec. Pangalenga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Kec. Pangalenga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 1.000.000 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kec. Pangalenga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Pangalenga | Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 75.000.000 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kec. Pangalenga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangalenga | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 70.000.000 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Kec. Pangalenga | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | 20.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Pangalenga | *Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum* | 100 % | 45.000.000,00 | |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 laporan | 50.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangalenga | *Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | 100 % | 40.000.000,00 | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 5.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Pangalenga | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 laporan | 5.000.000 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Pangalenga | Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah | 100% | 105.000.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | 100 % | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangalenga | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 105.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kec. Pangalenga | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 1 Laporan | 5.000.000,00 | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kec. Pangalenga | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Pangalenga | *Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* | 100 % | 145.000.000,00 | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kec. Pangalenga | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 50 Orang | 20.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangalenga | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | 100 % | 145.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec. Pangalenga | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 orang | 50.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kec. Pangalenga | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 50 Orang | 80.000.000,00 | |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 dokumen | 35.000.000 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kec. Pangalenga | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | 200 Orang | 30.000.000,00 | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Pangalenga | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100% | 95.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pangalenga | persentase desa yang dibina | 100% | 95.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Pangalenga | *Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa* | 100 % | 75.000.000,00 | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 dokumen | 30.000.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pangalenga | *Persentase desa yang dibina dan diawasi* | 100 % | 75.000.000,00 | |
| Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dokumen | 15.000.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Pangalenga | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Pangalenga | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | |

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2026 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan kebutuhan sumber daya untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan.

Terdapat catatan-catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangalengan tahun 2025 yaitu:

1. Terdapat penghapusan target kinerja maupun sumber daya anggaran pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Target pada rencana strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana masa jabatan Kepala Desa terpilih selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pangalengan, tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Namun terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Atas perubahan tersebut, subkegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dilaksanakan.
2. Terdapat perbedaan pagu anggaran pada rancangan awal RKPD tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut adalah hasil analisis kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi capaian program yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan tahun 2025.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025, tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan

Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2026. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pangalengan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, baik dari segi administrasi kependudukan maupun mengkoordinasikan pelayanan bersifat umum diantaranya pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketertiban wilayah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 didasarkan kepada RPJP Nasional 2005-2025 yang tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 dengan tetap

memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Renja Pembangunan Daerah Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Usulan program kegiatan yang diusulkan berdasarkan penelaahan berbagai aspek, yang dikerucutkan terhadap program kegiatan sesuai program prioritas Kecamatan daintaranya penunjang tata kelola internal (akuntabilitas), administrasi kependudukan, pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan ketertiban umum, olahraga pembinaan kepemudaan, wawasan kebangsaan dan stabilitas politik wilayah.

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pangalengan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | NIHIL | | | | |
| | | | | | |

# BAB III

# Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

## 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja SKPD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja Awal juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

### 3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Proses perencanaan yang transparan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan

desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;

3. Percepatan dan pencapaian target *Millennium Development Goal's* (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang- undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Pangalengan yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang

diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat "Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya".

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pangalengan adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan kegiatan setelah pagu indikatif RKPD Kabupaten ditetapkan.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terdapat tantangan-tantangan dalam Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.*".

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan

sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

2. Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi- misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
3. Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4. Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik
5. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Pangalengan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah telah merumuskan tujuan yang strategis sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur

Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam Misi ke 3, yaitu : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

Tujuan Kecamatan pangalengan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan, Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangalengan yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.

Tujuan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, tetapi juga menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik berarti memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan Pangalengan berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari peningkatan kapasitas

sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengoptimalan manajemen data dan administrasi, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedur operasional tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangalengan secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Pangalengan yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan menggunakan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang komprehensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian, pengukuran indikator tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pangalengan pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan Sasaran Kecamatan Pangalengan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Laju IKM | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | |
| | | Meningkatnya Kepuasan Mayarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | Nilai IKM | 85.24 | 85.44 | 85.65 | 85.85 | 86.08 | |

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah KECAMATAN
PANGALENGAN

| No | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Outcome Ultimate | Outcome Intermedite | Immediate outcome | Output | Proses | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan Pelayanan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | | | | | |
| 1.1 | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja | Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku | Prosentase dokumen Perancanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Darah yang disusun sesui ketentuan dan tepat | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | waktu | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranngkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| 1.1.2 | Tersusunya Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3 | Tersusunya Dokumen DPA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Tersusunnya dokumen administrasi keuangan | administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja | Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Persentase Dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai Ketentuan | | |
| 1.2.1 | Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN | |
| 1.3 | Terpenuhinya administrasi Barang milik Daerah | Terlaksanya Administrasi Barang Milik Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terusunnya Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangaleng an | Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukura n Kinerja | Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Persentas e Dokumen aPenataa Usahaan yang disusun sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD | |
| 1.4 | Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian | Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangaleng an | Nilai Evaluasi SAKIP kompone n Pengukur an Kinerja | Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran kinerja pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan | Persentas e ASN Yang tertangani pada layanan kepegawai an sesuai ketentuan | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jumlah Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan | | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Per undang-undangan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja | Jumlah Pelaksanaan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Evaluasi Sakip sesuai Ketentuan | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum sesuai Ketentuan | | |
| 1.4.3 | Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediak | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | an | |
| 1.4.5 | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | Jumlah Paket Bahan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | |
| 1.4.6 | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.7 | Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | |
| 1.4.8 | Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja | Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang berlaku | Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan sesuai Kebutuhan | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1 | Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |
| 1.5.2 | Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor | Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Umum Kantor yang Disedi | |
| 1.6 | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya pemenuhuan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan | Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja | Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai Ketentuan | Prosentase BMD dalam Kondisi Baik | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1 | Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | JumlahKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.2 | Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Persentase Pengunaan hasil pengukuran pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |
| 1.6.3 | Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | | | | | |
| 2.1 | Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan | Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | |
| . | Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerahdan /atau Instansi Vertikal yang Terkait | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai Dengan ketentuan | Persentase urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | | |
| 2.2.1 | Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat | Terlaksananya yrysan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa Pada Capaian Indeks Desa Membangun | Persentase lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang dibina | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| 3.1.1 | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | Jumlah lembaga Kemasyarakata yang berfartisifasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2 | Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan | Terlaksana dan terlaporaknnya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat | |
| 3.2.3 | Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan | Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Tercipatanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketretiban umum | Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum | | |
| 4.1.1 | Tercipatanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum | Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasion | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | al Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | Tercipatanya harmonisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat | Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan | Tercipatanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketretiban umum | Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Pelaturan Kepala Daerah | | |
| 4.2.1 | Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelyanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | | | | | |
| 5.1 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala Daerah terhadap jumlah Penugasan | Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap jumlah penugasan | Persentase Pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | |
| 5.1.1 | Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan | Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan | | | | | Jumlah Laporan yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pangalengan | Wawasan Kebangsaan Nasional | Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | | (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2 | Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Pangalengan | Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3 | Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun | Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa | |
| 6.1.2 | Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan | |

## 3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera"* dengan gerakan BEDAS sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Misi Nomor 3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik, maka Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan, disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program, kegiatandan Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Pangalengan.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bupati Terpilih Kecamatan Pangalengan, dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 yaitu :

TABEL T.C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN BANDUNG

OPD : Kecamatan Pangalengan

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 ( tahun rencana ) | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | |
| | KECAMATAN PANGALENGAN | | | | 6.211.714.984,00 | | | | | 5.102.405.260,00 | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.211.714.984,00 | | | | | 5.102.405.260,00 | |
| | KECAMATAN | | | | 6.211.714.984,00 | | | | | 5.102.405.260,00 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*<br>*Indeks Manajemen Risiko* | 61,00 Poin<br>40,30 Poin | 5.130.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*<br>*Indeks Manajemen Risiko* | 4.447.405.260,00 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Nilai AKIP* | 78,50 Poin | 48.600.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Nilai AKIP* | 18.400.000,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 2.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | 2.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | 2.000.000,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 5 Laporan | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 9.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah* | 1.700.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | 1 Data | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah* | 1.700.000,00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu* | 100 % | 4.401.360.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu* | 3.984.229.408,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 20 Orang/bulan | 4.397.960.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | 3.980.829.408,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 4 Laporan | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | 3.400.000,00 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD* | 100 % | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD* | 1.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1 Laporan | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 1.500.000,00 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu* | 100 % | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu* | 9.369.000,00 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 21 Paket | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | 369.000,00 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 50 Orang | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | 9.000.000,00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 100 % | 125.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | 55.000.000,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 3 Paket | 4.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | 4.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 12 Paket | 70.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | 10.000.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 12 Paket | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 5 Paket | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | 5.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | 6.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 12 Laporan | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 25.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 100 % | 428.340.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 341.040.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 4 Laporan | 3.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 3.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 12 Laporan | 48.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | 48.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 12 Laporan | 377.340.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | 290.040.000,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase BMD dalam Kondisi Baik* | 98,00 % | 110.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase BMD dalam Kondisi Baik* | 37.866.852,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 13 Unit | 55.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | 14.819.852,00 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 6 Unit | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | 10.547.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 2 Unit | 40.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | 12.500.000,00 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat* | 100 % | 490.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat* | 205.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum* | 100 % | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum* | 5.000.000,00 | |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum* | 5.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan* | 100 % | 475.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan* | 200.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | 12 Laporan | 475.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | 200.000.000,00 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina* | 100 % | 325.330.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina* | 175.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ] | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | 100.00 | 325.330.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | [ Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ] | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | 175.000.000,00 | |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | 100 % | 122.380.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | 75.000.000,00 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 4 Laporan | 122.380.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | 75.000.000,00 | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi* | 100 % | 95.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi* | 95.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | 50.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | 20.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | 1 Laporan | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | 25.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan* | 100 % | 107.950.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan* | 5.000.000,00 | |
| | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | 1.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* | 1.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat* | 1.000.000,00 | |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam* | 1.000.000,00 | |
| | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga* | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga* | 1.000.000,00 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 45.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 75.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | 100 % | 40.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | 70.000.000,00 | |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan* | 20.000.000,00 | |
| | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | 50.000.000,00 | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | 100 % | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | 5.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 1 Laporan | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia* | 5.000.000,00 | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* | 100 % | 145.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* | 105.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | 100 % | 145.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | 105.000.000,00 | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 50 Orang | 80.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* | 20.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | 200 Orang | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | 50.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | 35.000.000,00 | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa* | 100 % | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa* | 95.000.000,00 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase desa yang dibina dan diawasi* | 100 % | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Persentase desa yang dibina dan diawasi* | 95.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | 30.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | 1 Dokumen | 0,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | 15.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | 50.000.000,00 | |

# BAB IV
# Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangalengan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Renja program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan pada tabel 3.3. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2026 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah,

menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban. Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pangalengan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun Anggaran tahun 2026

| N O | Sasaran | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiat an | Lokasi | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 ( tahun rencana ) | | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | |
| | | KECAMATAN PANGALENGAN | | | | 6.211.714.984,00 | |
| | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 6.211.714.984,00 | |
| | | KECAMATAN | | | | 6.211.714.984,00 | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas kinerja Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Manajemen Risiko | 61,00 Poin 40,30 Poin | 5.130.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Nilai AKIP | 78,50 Poin | 48.600.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik | Kab. Bandung, Pangalengan, | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan | 1 Dokumen | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sektoral Daerah | Semua Kel/Desa | Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | |
| | | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | 100 % | 4.401.360.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | 4.397.960.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | 3.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD | 100 % | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1.700.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | 100 % | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 21 Paket | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 125.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 3 Paket | 4.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bangunan Kantor | Kel/Desa | Kantor yang Disediakan | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 70.518.800,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 428.340.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | 3.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 48.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 377.340.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | 98,00 % | 110.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan | 13 Unit | 55.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dinas Jabatan | | dibayarkan Pajaknya | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 2 Unit | 40.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2 | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | 100 % | 490.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100 % | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dan Prasarana Pelayanan Umum | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan | 100 % | 475.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 475.866.184,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | 100 % | 325.330.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 122.380.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 122.380.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi | 100 % | 95.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 50.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 % | 107.950.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 50 Keluarga | 21.590.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 45.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 40.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh | 1 Laporan | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan | 5.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100 % | 145.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 145.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 50 Orang | 80.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 200 Orang | 30.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | 35.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 6 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | 100 % | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Persentase desa yang dibina dan diawasi | 100 % | 75.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Dokumen | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen | 65.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

tahun 2026, Kecamatan Pangalengan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 6.211.714.984,00 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

# BAB V
# Penutup

## 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

## 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pangalengan tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan Seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu

terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra SKPD).
5. Renja Kecamatan PangalenganTahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baikdalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akanmembutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
8. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Plt. CAMAT PANGALENGAN

ttd

VENA ANDRIAWAN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA